



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 8 April 2020/Periodik - 2019)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KOTA SALATIGA
UNIT KERJA : INSPEKTORAT DAERAH
SUB UNIT KERJA : INSPEKTORAT DAERAH

I. DATA PRIBADI

1. Nama : KURNIA HARDJANTI
2. Jabatan : INSPEKTUR DAERAH
3. NHK : 157196

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** **Rp. 1.725.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 184 m2/360 m2 di KOTA SALATIGA ,
HASIL SENDIRI Rp. 550.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 206 m2/240 m2 di KOTA SALATIGA ,
HASIL SENDIRI Rp. 375.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 80 m2/40 m2 di KOTA SALATIGA ,
HASIL SENDIRI Rp. 125.000.000
4. Tanah Seluas 1192 m2 di KOTA SALATIGA , HASIL SENDIRI Rp.
525.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 92 m2/80 m2 di KOTA SALATIGA ,
HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 514.500.000**

1. MOBIL, MITSUBISHI L300 PICK UP Tahun 2005, HASIL SENDIRI
Rp. 50.000.000
2. MOBIL, MITSUBISHI TRUCK Tahun 2008, HASIL SENDIRI Rp.
65.000.000
3. MOBIL, SUZUKI KARIMUN MINIBUS Tahun 2015, HASIL SENDIRI
Rp. 62.000.000
4. MOTOR, YAMAHA SEPEDA MOTOR Tahun 2013, HASIL SENDIRI
Rp. 6.000.000
5. MOBIL, TOYOTA AVANZA Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp.
207.500.000
6. MOBIL, DAIHATSU DAIHATSU Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp.



124.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	274.000.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	---
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	535.590.129
F. HARTA LAINNYA	Rp.	---
Sub Total	Rp.	3.049.090.129
III. HUTANG	Rp.	150.000.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	2.899.090.129

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan **LENGKAP** berdasarkan hasil verifikasi tanggal **21 April 2020**.
4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.